

VOLUNTARISME POLITIK DI KALANGAN KELAS MENENGAH URBAN : TEMUAN AWAL¹

Oleh

Wasisto Raharjo Jati / Peneliti di Pusat Penelitian Politik – LIPI

Pendahuluan

Fenomena voluntarisme politik tengah menggejala dalam konstelasi politik Indonesia kekinian. Semangat itu muncul dan timbul sebagai respons atas kejengahan publik terhadap perilaku elite politik yang kian menyimpang dari cita-cita reformasi paska masa otoritarianisme selesai. Keinginan dan keyakinan publik terhadap pilihan demokrasi sebagai sistem politik justru dibajak oleh kepetingan para *oligarchs* dan predator politik. Publik pun melihat pemilu dan partai politik sebagai simpul penting terjadinya kondisi politik sekarang ini. Proses demokrasi yang dijalankan secara prosedural dan legal formal justru kian menciptakan adanya ketimpangan relasi antara negara dan masyarakat.

Secara garis besar, praktik demokrasi prosedural tidak bersimteris dengan adanya implementasi demokrasi substansial di ranah masyarakat. Indikasinya menciptakan adanya tingkat angka golongan putih yang semakin meningkat di ranah publik. Tercatat bahwa, terjadi fluktuasi partisipasi politik dalam event pemilu. Pemilu 1999 mencatatkan partisipasi pemilih sebesar 93,30 persen dengan angka golput mencapai 6,70 persen, Pemilu 2004 mencatatkan angka partisipasi memilih mencapai 84,07 persen dan angka golput mencapai 15,93 persen. Pemilu 2009 mencatat angka partisipasi memilih 70,99 persen dengan angka golongan putih mencapai 29,01 persen. Adapun pada pemilu terakhir pada tahun 2014 silam mencatatkan angka partisipasi 75,11 persen dengan angka golongan putih mencapai 24,89 persen². Semakin menurunnya angka partisipasi pemilih politik tersebut menunjukkan adanya rasionalitas dan kesadaran politik yang semakin meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan kelas menengah Indonesia sebagai kelas politis semakin menguat.

Kondisi menurunnya angka partisipasi memilih itulah yang mendorong publik menguatkan dirinya sebagai *demos* untuk mengartikulasikan dirinya sebagai kelompok kepentingan (*interest groups*) sekaligus pula kelompok penekan (*pressure groups*) secara

¹Paper disampaikan pada serial diskusi Epistema Institute, 5 Agustus 2016.

²Detikews, "Dibanding Tahun 2009, Angka Golput Pemilu 2014 Lebih Rendah", accessed from <http://news.detik.com/berita/2578828/dibanding-tahun-2009-angka-golput-pemilu-2014-lebih-rendah>, 3 Agustus 2016, jam 08.40 WIB.

bersamaan. Implikasinya kemudian memicu terbentuknya berbagai macam kelompok sukarelawan politik (*political volunteers*) di ranah publik. Mereka berupaya ingin mengawal proses pemilu maupun juga kandidasinya agar bisa memenuhi harapan publik. Berbagai kelompok sukarelawan tersebut telah muncul misalnya saja “Teman Ahok”, “Relawan Jokowi”, “Kawal Pemilu”, dan lain sebagainya. Mereka tampil sebagai kelompok politik aktif yang terbangun dari nilai-nilai modal sosial yang kemudian bertransformasi menjadi kelompok relawan. Oleh karena pertanyaan paper temuan awal ini adalah bagaimana fenomena voluntarisme itu dikerangkai dan seperti apa modelnya ?.

Paper ini berusaha untuk menganalisis fenomena model voluntarisme politik di kalangan kelas menengah Indonesia yang memunculkan adanya berbagai kelompok sukarelawan politik Indonesia.

Voluntarisme Politik dalam Kajian Komparatif

Voluntarisme secara sederhana dipahami sebagai sikap sukarelawan atau kerja sosial. Secara definitif voluntarisme adalah kerja politik yang berdimensi altruistik dan filantropis berorientasikan pada perubahan sosial-politik. Dua dimensi nilai dalam voluntarisme tersebut mengindikasikan adanya budaya kewargaan yang kuat (*civic culture*) dalam ruang publik. Terkait dengan adanya budaya kewargaan tersebut, maka terdapat dua arus pemikiran utama dalam membedah makna voluntarisme politik dari segi tataran konseptual. Dalam pemahaman Anglo-Saxon, voluntarisme politik diartikan sebagai kerja advokasi yang dilakukan oleh masyarakat marjinal dalam mengajudikasi kepentingan mereka terhadap negara (Wilson, 2007: 335). Hal tersebut sebenarnya terkait dengan sejarah pertarungan kelas di Inggris yang kemudian menghasilkan *House of Commons* sebagai titik kulminasi voluntarisme politiknya Masyarakat bawah yang digawangi oleh kelas borjuasi kecil maupun intelektual tampil sebagai *demos* dalam arti riil. Dengan kata lain puncak dari aktivitas voluntarisme adalah institusionalisasi politik di akar rumput dimana sekarang muncul kelompok masyarakat yang aktif dalam politik

Sedangkan dalam tradisi Germania, tradisi voluntarisme sangat erat kaitan dengan tradisi sosial demokratik yang berkembang dalam negara kesejahteraan (Wilson, 2007). Orientasi voluntarisme politik bukanlah mengarahkan pada perubahan sosial maupun juga pengawasan kekuasaan, namun lebih kepada redistribusi *public goods* antara sesama warga negara. Masyarakat lebih berperan sebagai kelompok kepentingan terhadap relasinya dengan negara

untuk memastikan negara berfungsi sebagai penjamin atas pelayanan publik dan juga *public goods*.

Pengalaman voluntarisme yang berkembang dalam dua negara Barat tersebut memang berkembang seiring dengan runtuhnya kekuasaan Gereja dan berkembangnya sekulerisme politik. Masyarakat melalui semangat republikanisme berupaya untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi sebagai jalan penyelenggaraan negara. Adapun sebagai kajian komparasi, kemunculan voluntarisme politik di negara berkembang atau negara demokrasi baru memiliki pengalaman sedikit berbeda dengan Barat. **Pertama**, negara berkembang tidak memiliki akar sosial demokrasi yang kuat seperti Barat, malahan justru iklim patrimonialisme yang kuat. **Kedua**, dimensi voluntarisme politik yang berkembang di negara demokrasi baru tidak mengarahkan pada bentuk institusionalisasi politik, namun lebih kepada respons emosional publik terhadap kondisi yang ada. **Ketiga**, tidak ada kelanjutan dari gerakan voluntarisme politik yang berkembang dalam negara demokrasi, selain hanya menjadi kelompok partisan, masuk dalam lingkaran kekuasaan dan kemudian menjadi elite baru.

Dengan kata lain, voluntarisme sendiri sebenarnya adalah gerakan partisan secara politik yang mendukung adanya perubahan sosial politik melalui cara-cara politik ekstra parliamenterisme. Masing-masing memiliki orientasi tersendiri untuk menghendaki perubahan tersebut, apakah dalam arti merebut kekuasaan, mempertahankan *status quo* terhadap sistem yang ada, atau hanya sekedar memperbaiki sistem ada. Oleh karena itulah diperlukan adanya entitas yang dikonstruksikan sebagai hal yang perlu diperbaiki oleh masyarakat kelas menengah. Kasus voluntarisme di negara baru menempatkan masalah publik dan representasi kepentingan menjadi indikator penting memicu gerakan sukarelawan politik. Sementara di kalangan negara demokrasi baru, pengalaman kekerasan dan marginalisasi menjadi simbol penting terjadinya gerakan voluntarisme politik.

Dengan kata lain, voluntarisme di negara demokrasi baru menempatkan otoritarianisme politik sebagai musuh bersama dan menjadi “pemicu” terhadap proses munculnya gerakan voluntarisme politik di kalangan kelas menengah urban yang menjadi aktor politik aktif dalam ruang publik masyarakat. Adanya ketiga analisis komparatif itulah yang menjadi basis penting untuk melihat fenomena voluntarisme politik yang berkembang dalam kasus kelas menengah Indonesia kekinian.

Voluntarisme Politik dalam Kasus Kelas Menengah Indonesia

Gejala voluntarisme politik yang berkembang di kalangan kelas menengah Indonesia dapat ditelusuri adanya kebangkitan representasi populer yang menggejala dalam kasus negara demokrasi dunia ketiga (Tornquist, 2009). Representasi populer tersebut merupakan respons dari masyarakat dunia ketiga terhadap sistem demokrasi yang tidak adil seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam awal tulisan ini. Hal itulah yang kemudian mendorong adanya voluntarisme politik untuk mewujudkan partisipasi politik aktif publik yang tidak hanya menjadi objek politik pasif dalam event pemilu. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya, adalah bagaimana model voluntarisme politik yang berkembang dalam konstelasi politik Indonesia ?

Kemunculan gerakan voluntarisme politik di Indonesia dapat dianalisis dalam dua analisis penting yakni, **pertama**, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan demokrasi dari cengkraman kekuasaan oligarkis dan koruptif. Indikasiya bisa dilihat dari kemunculan berbagai macam perkumpulan sipil, maupun keriuhan yang muncul di ruang publik, dan juga diskursus skeptis mengenai jalannya pemerintahan sekarang ini. **Kedua**, munculnya gelombang populisme yang menginginkan partisipasi lebih masyarakat sipil dalam proses pemerintahan. Setelah sebelumnya, model *auxillary agencies* dinilai tidak berpengaruh dalam menjembatani aspirasi publik. Maka dibutuhkan adanya partisipasi yang sifat informal, namun lebih mengena pada level kebijakan. Hal itulah yang menjadikan nilai – nilai voluntarisme politik yang berkembang seperti halnya egalitarian, komunitarian, maupun juga spontanitas menjadi nilai penting yang dibahas. Ketiga nilai tersebut merupakan pengembangan dari nilai-nilai modal sosial yang telah ada sebelumnya.

Berbagai macam kelompok gerakan sukarelawan tersebut misalnya saja “Relawan Jokowi”, “Sahabat Ridwan Kamil”, “Teman Ahok”, “Sedulur Dimiyati”, dan lain sebagainya mengindikasikan bahwa voluntarisme tersebut berkembang dan mengikuti pola populisme tokoh yang menjadi media pengikat solidaritas maupun juga soliditas kelas menengah untuk mendukung calon tersebut. Selain itu, ada pula model voluntarisme politik yang terafiliasi secara organik dengan partai politik misalnya saja Garda Bangsa (PKB), Tidar (Gerindra), Repdem (PDI-P), GPK (PPP), dan lain sebagainya. Model voluntarisme politik seperti itu merupakan jalan tengah bagi partai politik untuk merangkul kelas menengah untuk tetap memilih partai politik. Keanggotaannya bersifat cair dan inklusif agar tidak menampilkan relasi yang formal dengan partai politik. Pola partisan tersebut sebenarnya merupakan bagian

strategi membangun konektivitas antara politik formal maupun politik informal dengan masuk pada arena kekuasaan.

Namun demikian ada pula yang sifatnya independen dan non partisan semisalnya saja Kawal Pemilu maupun juga Kawal Pemilukada yang berorientasi pada pengawalan hasil pemilu maupun proses kandidasi sejak awal hingga pada pemilihan. Mereka secara sukarela berupaya dari hati nurani untuk ikut andil dalam proses pemilu sehingga tidak ada proses kecurangan di dalamnya. Ketiga pola itulah yang berkembang dalam voluntarisme politik yang berkembang dalam kelas menengah Indonesia kekinian. Keinginan untuk melakukan perubahan sosial politik itu dilakukan dengan cara partisan / non partisan yang pada intinya ingin membawa nilai-nilai demokrasi substansial ke dalam ranah formal dan mengembalikan proses pemerintahan agar lebih banyak mendengar dan melayani kepentingan publik secara lebih meluas. Maka menarik untuk melihat secara elaboratif mengenai politik voluntarisme ini ke depannya.

Kesimpulan

Hal yang bisa disimpulkan dari paper temuan awal mengenai voluntarisme politik di kalangan kelas menengah baru ini adalah voluntarisme yang baru memasuki tahap awal. Maksudnya ialah tumbuh kembangnya sikap sukarelawan politik sendiri masih bersifat mengarah pada kekuasaan sehingga sifatnya lebih partisan. Hal tersebut sebenarnya bukanlah hal negatif mengingat hampir mayoritas model voluntarisme politik yang berkembang juga berciri khas sama.

Mengingat model voluntarisme di kalangan kelas menengah Indonesia masih bersifat spontan dan berbasis isu. Maka diperlukan adanya perkembangan selanjutnya yakni semangat advokasi yang hingga kini belum menemukan model yang tepat dalam membangun representasi baik antara ranah masyarakat sipil dengan negara. Padahal itu menjadi penting dan menjadi saluran alternatif manakala partai politik telah kehilangan fungsinya sebagai lembaga penyalur aspirasi.

Pustaka

Detikews, “Dibanding Tahun 2009, Angka Golput Pemilu 2014 Lebih Rendah”, accessed from <http://news.detik.com/berita/2578828/dibanding-tahun-2009-angka-golput-pemilu-2014-lebih-rendah>, 3 Agustus 2016, jam 08.40 WIB.

Tornquist, Olle, et.al. 2009. *Rethinking Popular Representation*. New York : Palgrave.

Wilson, John, et.al. 2007. *Volunteers: A Social Profile*. Bloomington : Indiana University Press.